

URGENSI MANAJEMEN HUMAS DAN PERAN STAKEHOLDERS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

Yudi Ardian Rahman

STIT AL-Ishlah Bondowoso, Jl Raya Jember No 17-19 Dadapan Grujungan Bondowoso

Email: yudiardianrahman1978@gmail.com

ABSTRACT

Schools have an obligation to explain about educational programs, educational goals, needs and circumstances that occur in the community, in this case the school is an agent of change for the surrounding community, because in the school that the community will change for the better in accordance with the demands of education that develops in the current era of globalisation. Therefore, between education, schools and communities have a mutually supportive relationship, so it is necessary to make the right management to develop it. School programs can only run smoothly if they have community support. Therefore, the principal (principal) needs to continuously foster good relations between the school and the community. The relationship of the school with the community is essentially a means that is very instrumental in fostering and developing the personal growth of learners in school. In this regard, school as a social system is an integral part of the larger social system, namely society. Schools and communities have a very close relationship in achieving school or educational goals effectively and efficiently.

Keyword: *Public Relations Management, Stakeholder Role, Islamic Religious Education.*

ABSTRAK

Sekolah mempunyai berkewajiban untuk menjelaskan tentang program-program pendidikan, tujuan-tujuan pendidikan, kebutuhan serta keadaan yang terjadi dalam masyarakat, dalam hal ini sekolah merupakan agen perubah bagi masyarakat sekitarnya, karena di sekolah itulah masyarakat akan berubah menjadi lebih baik sesuai dengan tuntutan pendidikan yang berkembang pada era globalisasi saat ini. Oleh karena itu antara pendidikan, sekolah dan masyarakat mempunyai hubungan yang saling mendukung, sehingga perlu sekali manajemen yang tepat untuk mengembangkannya. Program sekolah hanya dapat berjalan lancar apabila mendapat dukungan masyarakat. Oleh karena itu pimpinan sekolah (kepala sekolah) perlu terus menerus membina hubungan yang baik antara sekolah dan masyarakat. Hubungan sekolah dengan masyarakat pada hakikatnya merupakan suatu sarana yang sangat berperan dalam membina dan mengembangkan pertumbuhan pribadi peserta didik di sekolah. Dalam hal ini, sekolah sebagai sistem sosial merupakan bagian integral dari

sistem sosial yang lebih besar, yaitu masyarakat. Sekolah dan masyarakat memiliki hubungan yang sangat erat dalam mencapai tujuan sekolah atau pendidikan secara efektif dan efisien.

Kata Kunci: Urgensi, Manajemen Humas, Peran Stakeholders, Pendidikan Agama Islam.

A. PENDAHULUAN

Pengertian Manajemen Humas Pendidikan

Kata “manajemen” jika kita lacak akar bahasanya ternyata berasal dari bahasa latin, yaitu dari kata manus yang berarti tangan, dan agree yang berarti melakukan. Kata-kata sebagaimana telah diuraikan, jika digabung menjadi kata kerja “manager” yang artinya menagani.¹ Menurut Mary Parker Follet manajemen adalah seni melaksanakan suatu pekerjaan melalui orang-orang. Selain tersebut, manajemen sering pula diartikan sebagai pengaturan atau pengelolaan sumber daya yang ada sehingga hasilnya maksimal.²

Pengertian lain dari manajemen menurut Malayu hasibuan dalam bukunya manajemen dasar kata manajemen berasal dari kata *to manage* yang artinya mengatur, dengan demikian manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. “Sedangkan menurut G.R Terry manajemen adalah proses yang khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, pengarhan pengendalian yang dilakukan untuk menentukan serta mencapai sasaran yang telah di tentukan.³ Dari beberapa pengertian manajemen menurut para ahli maka penulis dapat menjelaskan bahwa manajemen merupakan sebuah seni dalam mengatur atau mengelola segala sumber daya yang ada untuk memperoleh hasil yang maksimal sesuai dengan kebutuhan manusia. Manajemen dimanfaatkan manusia untuk mempermudah segala urusan manusia sesuai dengan apa yang ingin dalam hidupnya.

Sedangkan pengertian HUMAS menurut persatuan para ahli dan praktisi public relations (HUMAS) yang menjadi satu dalam Internasional Public Relations Assosiation (IPRA) memberikan definisi kinerja public relations (HUMAS) adalah fungsi manajemen

¹ Agus Wibowo, *Manajemen Pendidikan Karakter di Sekolah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2013) Hal 291.

² Ati Cahayani, *Dasar-Dasar Organisasi Dan Menejemen*, (Jakarta : PT Grasindo, 2003) Hal 6

³ Luftiaafiyah. Nextwapblog.Com/Fungsi-Dan-Peran-Humas-Dilembaga-Pendidikan.Html

yang khas yang mendukung pembinaan dan pemeliharaan jalur bersama antara organisasi dengan publiknya mengenai komunikasi, pengertian, penerimaan dan kerjasama, melibatkan penerangan dan tanggapan dalam hubungannya dengan opini publik; menetapkan dan menekankan tanggung jawab manajemen untuk melayani kepentingan umum; menopang manajemen dalam mengikuti dan memanfaatkan perubahan secara efektif, bertindak sebagai sistem peringatan yang dini dalam membantu kecenderungan dan melakukan penelitian serta teknik komunikasi yang sehat dan etis sebagai sarana utama.⁴

Dari uraian pengertian diatas Humas yang merupakan kepanjangan dari Hubungan Masyarakat merupakan sebuah wadah bagi sebuah organisasi atau instansi sebagai mediasi dan sarana informasi, komunikasi yang menghubungkan kedua belah pihak sehingga terjadi keharmonisan hubungan dan keuntungan sesuai dengan yang diinginkan bersama

Pengertian Stakeholder pada awalnya digunakan dalam dunia usaha, istilah ini berasal dari bahasa Inggris terdiri atas dua kata ; *stake* dan *holder*. *Stake* berarti *to give support to* / pancang , *holder* berarti pemegang. Jadi stakeholder adalah siapapun yang memiliki kepentingan dari sebuah usaha.

Stakeholder dapat berfungsi sebagai “tokoh kunci” atau “*key person*” dan merupakan orang yang menjadi panutan bagi masyarakat sekitarnya, seperti : Kepala Desa/Lurah, Ketua RT, Ketua Adat, Ustadz/Kyai.

Kelembagaan yang dianjurkan dibentuk untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan, menurut UU No 20 Tahun 2003, pasal 56 adalah berupa Dewan Pendidikan, dan komite sekolah. Ketua dan anggota kedua lembaga tersebut dapat digolongkan sebagai Stakeholder

Dalam buku *Cultivating Peace*, Ramizes mengidentifikasi berbagai pendapat mengenai stakeholder ini. Beberapa definisi yang penting dikemukakan yaitu :

- a) Freeman (1984) yang mendefinisikan stakeholder sebagai kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi dan atau dipengaruhi oleh suatu pencapaian tujuan tertentu.
- b) Biset (1998) secara singkat mendefinisikan stakeholder merupakan orang dengan suatu kepentingan atau perhatian pada permasalahan. Stakeholder ini sering diidentifikasi dengan suatu dasar tertentu sebagaimana dikemukakan Freeman (1984), yaitu dari segi kekuatan dan kepentingan relatif stakeholder terhadap isu, Grimble and Wellard (1996), dari segi posisi penting dan pengaruh yang dimiliki mereka.

⁴ <https://rofiana.wordpress.com/11/06/09/makalah-peran-humas-dalam-lembaga-pendidikan>

c) Stakeholder adalah kelembagaan yang dianjurkan dibentuk untuk meningkatkan peran serta masyarakat dalam memajukan pendidikan, dan komite sekolah.

Definisi lain dari stakeholder adalah pemegang atau pemangku kepentingan. Orang per orang atau kelompok tertentu yang mempunyai kepentingan apa pun terhadap sebuah obyek disebut stakeholder.

Jadi stakeholder pendidikan dapat diartikan sebagai orang yang menjadi pemegang dan sekaligus pemberi support terhadap pendidikan atau lembaga pendidikan. Dengan Perkataan lain stakeholder adalah orang-orang atau badan yang berkepentingan langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan pendidikan di sekolah.⁵

Penurut Ki Hajar Dewantoro pendidikan adalah daya upaya untuk memajukan budi pekerti (kekuatan batin), pikiran (intellect) dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan mayarakatnya.⁶Pendidikan merupakan sebuah proses memanusiakan manusia melalui pengangkatan manusia ke taraf insani. Artinya pendidikan adalah usaham yang dapat membawa manusia keluar dari kebodohan, dengan membuka tabir dari sifat alami manusia. Proses belajar yang dilakukan menuntut manusia untuk memahami manusia lain disisi lain ia juga harus memahami sifat individu yang dimiliki juga barbeda dengan orang lain.

Dari uraian tentang pengertian manajemen, Humas, stakeholder dan Pendidikan jika digabungkan dalam satu kalimat maka penegertian manajemen Humas dan stakeholder pendidikan adalah sabuah cara bagaimana mengatur dan mengelola sekolah sebagai sebuah lembaga pendidikan yang hubungan sekolah dan masyarakat atau komponen-komponen yang lain terkait dengan pendidikan.

B. PEMBAHASAN

Tujuan Manejemen HUMAS Pendidikan

Secara umum hubungan sekolah dengan masyarakat memiliki tujuan yang hendak di capai yaitu peningkatan mutu pendidikan, sehingga masyarakat dapat merasakan dampak langsung dari peningkatan mutu dari pendidikan berupa kemajuan dari sekolah. Adapun tujuan kongrit dari managemen hubungan antara sekolah dengan masyarakat antara lain adalah:

⁵ <http://huurinien.blogspot.co.id/2015/09/stakeholder-dalam-pendidikan.html>

⁶ Agus Wibowo, *Manajemen Pendidikan Karakter Di Sekolah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar,2013) hal 29

- a. Meningkatkan kualitas pembelajaran dan pertumbuhan peserta didik
- b. Berperan dalam memahami kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang sekaligus menjadi desakan yang dirasakan saat ini
- c. Berguna dalam mengembangkan program-program sekolah kearah yang lebih membumi agar dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sebagai sebagai pengguna jasa pendidikan.⁷

Untuk membantu pemahaman tentang makna dari hubungan sekolah dan masyarakat maka oteng (Administrasi dan Supervisi Pendidikan) mengungkapkan bahwa hubungan sekolah dan masyarakat memiliki tujuan dalam

1. Mengembangkan pemahaman tentang maksud dan sarana-sarana dari sekolah
2. Menilai program sekolah dengan kata-kata kebutuhan-kebutuhan terpenuhi
3. Mempersatukan orang tua, murid serta guru-guru dalam memenuhi kebutuhan perkembangan peserta didik
4. Mengembangkan kesadaran akan pentingnya pendidikan sekolah dalam era pembangunan
5. Membangun dan memelihara kepercayaan terhadap sekolah
6. Memberi tahu masyarakat tentang tentang pekerjaan sekolah
7. Mengerahkan bantuan dan dukungan bagi pemelihara dan peningkatan program sekolah.

Fungsi Manajemen Humas Pendidikan

Sedangkan menurut Zulkarnain Nasution fungsi humas pada lembaga pendidikan sebagai berikut:

- a. Mampu sebagai mediator dalam menyampaikan komunikasi secara langsung (komunikasi tatap muka) dan tidak langsung (melalui media/pers) kepada pimpinan lembaga publik intern (dosen/guru, karyawan dan mahasiswa/siswa).
- b. Mendukung dan menunjang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan mempublikasi lembaga pendidikan. Dalam hal ini humas bertindak sebagai pengelola informasi kepada publik intern dan publik ekstern, seperti: menyampaikan informasi kepada pers dan promosi

⁷ Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia, *Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2015) hal 280

c. Menciptakan suatu citra yang positif terhadap lembaga pendidikannya.⁸

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi humas di lembaga pendidikan adalah menumbuh dan mengembangkan hubungan yang harmonis melalui komunikasi dengan menggunakan media antara sekolah dengan publiknya, baik *intern* (dosen/guru, karyawan, mahasiswa/siswa) maupun *ekstern* (orang tua mahasiswa/orang tua siswa, masyarakat, instansi lain) dalam rangka mempublikasikan kegiatan humas di lembaga pendidikan sehingga menciptakan suatu opini, citra dan reputasi yang positif terhadap lembaga pendidikan tersebut serta fungsi humas pada lembaga pendidikan kedepan dituntut selalu profesional dalam mengelola informasi sehingga terwujudnya citra positif pada lembaga, sebab itu peran komunikasi sangatlah penting. Pentingnya humas pendidikan dapat di terangkan sebagai berikut :

1. Humas merupakan suatu kegiatan yang sangat diperlukan dalam semua pelaksanaan pekerjaan karena memiliki sarana untuk mengenalkan diri kepada masyarakat luas tentang apa yang sedang dan akan dikerjakan.
2. Humas merupakan alat untuk menyebarkan gagasan kepada orang lain.
3. Humas dapat digunakan sebagai sarana untuk memperoleh bantuan yang diperlukan dari orang atau badan lain.
4. Humas mendorong usaha seseorang untuk atau suatu badan untuk membuka diri agar diberi masukan dengan kritik dan saran dari orang lain.
5. Humas memenuhi keingintahuan manusia dalam rangka memenuhi naluri untuk selalu berkembang.⁹

Pada era global dimana segala sesuatunya sudah meningkat lebih cepat baik dalam masalah pendidikan maupun teknologi akan menciptakan perubahan-perubahan pada aspek kehidupan. Oleh karena itu lembaga pendidikan juga harus mampu menyeimbangi perubahan tersebut. Pada era global lembaga pendidikan juga harus berani menghadapi persoalan global yang mungkin timbul akibat adanya perubahan pada aspek kehidupan masyarakat, khususnya mengantisipasi opini negatif dari masyarakat. Untuk menghadapi persoalan global dan mengantisipasi opini negatif suatu lembaga pendidikan memerlukan humas sebagai fungsi manajemen. Fungsi humas pada lembaga pendidikan antara lain :

⁸ Zulkarnain Nasution, *Manajemen Humas di Lembaga Pendidikan*, (Malang : UMM Perss, 2006) hal 28

⁹ Suharsimi arikunto dan Lia Yuliana, *Manajemen Pendidikan*, (Jakarta : Aditya Media, 2012) , Hal. 353.

1. Humas harus mampu menjadi mediator komunikasi dalam sebuah lembaga pendidikan, baik secara langsung (tatap muka) maupun secara tidak langsung (melalui media/pers).
2. Menciptakan dan mendukung serta menunjang kegiatan yang dilakukan untuk proses mempublikasikan lembaga pendidikan. Dalam hal ini humas berfungsi untuk memasarkan atau mempromosikan lembaga pendidikan.
3. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat atau publik intern, serta menciptakan image positif pada lembaga pendidikannya. Menjaga hubungan baik dengan masyarakat dilakukan guna untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat.

Teknik Teknik Manajemen Humas Dalam Pendidikan

Humas dalam satuan pendidikan Islam dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan bentuk yang tentunya disesuaikan dengan kondisi masyarakat di sekitarnya. Dengan demikian untuk menghadapi berbagai ragam masyarakat membutuhkan teknik tersendiri, agar proses humas berjalan secara efektif dan efisien. Adapun teknik dalam humas dapat dibedakan menjadi 3 macam yaitu:

1. Teknik humas dengan kata-kata (lisan dan tulisan)
2. Teknik humas dengan perbuatan
3. Teknik terpadu (kata-kata dan perbuatan)

Adapun untuk mengkonstruksikan antara teknik dengan bentuk humas secara operasionalnya, bahwa teknik kata-kata dapat dilakukan antara lain dengan kontak melalui surat, brosur, buletin dan lain sebagainya. Sedangkan teknik perbuatan dapat dilakukan melalui bakti sosial, karya wisata, pertunjukan, pameran dan lain sebagainya. Dan teknik perpaduan antara keduanya dapat dilakukan melalui silaturahmi, iklan di televisi dan sebagainya.

Komponen Stakeholder Pendidikan

1. Masyarakat lokal (ada anggapan pendidikan hanya tanggung jawab pemerintah, sehingga desentralisasi pendidikan belum dimaknai oleh masyarakat sebagai pengembangan kemajuan pendidikan). UU No 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah telah mengilhami otonomi pendidikan di daerah. Namun dalam tahun 2006 muncul apa yang kita kenal Ujian Nasional, padahal konsep tersebut cenderung konsep penyeragaman budaya yang berbeda. Bukankah pendidikan yang demokratis adalah pendidikan yang memberikan kebebasan bagi daerah untuk menyesuaikan dengan

perkembangan daerahnya serta apakah pengelolaan sumberdaya alam dan sumberdaya manusia yang di daerah dapat disamaratakan kualitasnya. Fungsi pendidikan kekinian adalah transisi iptek dan masyarakat masa depan yang menghargai kebhinekaan dan keragaman pendapat.

2. Orang tua (selalu beranggapan sekolah saja tempat pendidikan, sehingga kurang serius memperhatikan kemajuan anak baik secara behavior maupun psikologis). Peserta didik lebih cenderung terbentuk dari karakter proses kehidupan dalam keluarga, sekolah lebih cenderung memberikan pengetahuan saja. Namun sangat disayangkan bahwa kondisi orangtua dalam masyarakat Indonesia masih hidup terbelakang baik secara ekonomi maupun kesehatan (kurang gizi), serta kerja yang serabutan, sehingga dapat kita bayangkan bagaimana generasi yang dihasilkannya dalam rangka peningkatan pendidikan non-formal anak disamping pendidikan di sekolah.
3. Peserta didik (belum sepenuhnya peserta didik dari berbagai tingkatan yang tertampung, sehingga berdampak pada jumlah anak putus sekolah karena biaya tinggi dan juga kurang didukung oleh faktor pendekatan fisik (gizi) dan pendekatan psikis.
4. Negara (dari segi material bahwa negara belum menempatkan pos khusus untuk pendidikan, dan kesannya dana pendidikan disediakan secara tambal sulam, jelas kita akan mengetahui apa hasil pendidikan dengan dana terbatas. Siap atau tidak siap, pendidikan di daerah memerlukan perhatian serius terutama dalam pengelolaan sumberdaya alam dan pemanfaatan sumberdaya manusia di daerah. Selanjutnya dana pendidikan 20% yang dianggarkan dalam APBN/APBD masih sebatas wacana, walaupun ada biaya murah atau gratis biaya pendidikan di daerah-daerah tertentu, kesannya dipaksakan untuk populis saja bahkan untuk menarik simpati partai politik pendukung saja bukan sebagai bentuk perencanaan pendidikan yang matang.
5. Pengelola profesi pendidikan (cenderung menyelenggarakan pendidikan bukan motif mencerdaskan tetapi profit oriented atau bisnis sehingga pendidikan terkesan mahal, sementara pendidikan formal yang disediakan negara sangat terbatas menampung peserta didik). Dikawatirkan oleh Neils Postman seorang pemikir pendidikan dunia, akan terjadi apa yang dinamakan *teacher as as subversive activity*. Untuk itu sekolah harus bisa menjadi alat kontrol cita-cita kemajuan bangsa sesuai filsafat pendidikan dan arah kebijakan pembangunan nasional yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 45.¹⁰

¹⁰ <http://huurinien.blogspot.co.id/2015/09/stakeholder-dalam-pendidikan.html>

Lembaga Pendidikan Islam

Lembaga pendidikan Islam adalah lembaga pendidikan yang dikelola, dilaksanakan, dan diperuntukkan bagi umat Islam. Oleh sebab itu, lembaga pendidikan Islam menurut bentuknya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu lembaga pendidikan Islam di luar sekolah dan lembaga pendidikan Islam didalam sekolah.

Pendidikan Islam memandang keluarga, masyarakat, dan tempat-tempat peribadahan ataupun lembaga-lembaga pendidikan di luar sekolah (informal dan non formal), seperti Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ) sebagai bentuk pendidikan, dan ini dalam sistem pendidikan nasional disebut pendidikan diluar sekolah (informal). Sedangkan bentuk-bentuk lembaga pendidikan Islam di dalam sekolah kita kenal dengan sekolah Islam, Madrasah, Lembaga Pendidikan Kejuruan (LPK) Islam, Balai Latihan Kerja (BLK) Islam, Perguruan Tinggi Islam dan seterusnya.

Keberadaan lembaga/institusi pendidikan Islam di Indonesia dapat dibedakan dalam tiga kelompok besar: (a) pesantren, (b) sekolah Islam atau madrasah, dan (c) pendidikan Nonformal/Informal, seperti pendidikan dalam keluarga, Taman Pendidikan Al- Qur'an (TPQ), ataupun Majelis Taklim.

1. Pesantren atau pondok pesantren

Sebagai suatu lembaga pendidikan jelas sekali bahwa pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang berada di luar sistem persekolahan (pendidikan di luar sekolah). Pesantren tidak terikat oleh kurikulum, perjenjangan, kelas-kelas atau jadwal pembelajaran terencana secara ketat. Pesantren merupakan suatu sistem pendidikan di luar sekolah yang berkembang di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, dalam banyak hal lembaga pendidikan ini bersifat merakyat (Muliawan, Pendidikan Islam In trgratif, 2005 : 154)

Pondok pesantren sebagai lembaga pendidikan mempunyai ciri-ciri umum dan khusus. Adapun ciri-ciri umumnya ditandai dengan adanya:

- a. Kyai (abunya, encik, tuan guru) sebagai sentral figur, yang biasanya juga disebut pemilik.
 - b. Asrama (kampus atau pondok) sebagai tempat tinggal para santri, dimana masjid sebagai pusarnya.
-

- c. Adanya pendidikan dan pengajaran agama melalui sistem pengajian (weton, sorogan, dan bandongan), yang sekarang sebagian sudah berkembang dengan sistem klasikal atau madrasah. Pada umumnya kegiatan tersebut sepenuhnya di bawah kedaulatan dan leadership seorang atau beberapa orang kyai.

Sedangkan ciri khususnya ditandai dengan sifat karismatik dan suasana kehidupan keagamaan yang mendalam. Ciri-ciri tersebut itulah yang membedakan antara pendidikan pondok pesantren dengan pendidikan lainnya.

2. Madrasah atau sekolah Islam

Madrasah adalah tempat pendidikan yang memberikan pendidikan dan pengajaran yang berbeda di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Yang dalam kategori Madrasah ini adalah lembaga pendidikan Ibtida'iyah, Tsanawiyah, Aliyah, Muallimin, Muallimat serta Diniyah. Lahirnya lembaga ini merupakan kelanjutan sistem di dunia pendidikan pesantren yang di dalamnya terdapat unsur-unsur pokok dari suatu pesantren. Unsur-unsur tersebut adalah kyai, santri, pondok, masjid dan pengajaran mata pelajaran agama Islam. Sedangkan pada sistem madrasah, tidak harus ada pondok, masjid dan pengajian kitab-kitab klasik. Atau dengan kata lain lahirnya lembaga ini merupakan kelanjutan sistem pendidikan pesantren gaya lama, yang dimodifikasikan menurut model penyelenggaraan sekolah-sekolah umum dengan sistem klasikal.

Di samping memberikan pengetahuan agama, diberikan pengetahuan umum sebagai pelengkap. Inilah ciri madrasah pada mula berdirinya di Indonesia sekitar abad ke-19 atau awal abad ke-20. Sesuai dengan falsafah negara Indonesia, maka dasar pendidikan madrasah adalah ajaran agama Islam falsafah negara Pancasila dan UUD 45. Bertitik tolak dari prinsip madrasah ini, maka pendidikan dan pengajarannya diarahkan untuk membentuk manusia pembangunan yang pancasilais yang sehat jasmani dan rohani, memiliki pengetahuan dan ketrampilan, dapat menyuburkan sikap demokrasi, dapat mengembangkan kecerdasan yang tinggi dan disertai budi pekerti yang luhur, mencintai bangsanya dan mencintai sesama manusia sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam UUD 1945.

3. Pendidikan Nonformal/Informal

Pendidikan Nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, seperti pendidikan: kecakapan hidup, anak usia dini, kepemudaan, pemberdayaan perempuan, keaksaraan, ketrampilan

dan pelatihan kerja, kesetaraan serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik.

Sedangkan pendidikan Informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan (2003, 2003: 5). Pendidikan Nonformal/Informal yang dimaksud adalah seperti pendidikan dalam keluarga, Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ), ataupun majlis taklim (Muliawan, Pendidikan Islam Integratif, 2005: 35)

a. Keluarga

Keluarga secara normatif termasuk ke dalam kelompok lembaga pendidikan di luar sekolah. Islam memandang keluarga sebagai salah satu bentuk lembaga pendidikan karena di dalam keluarga berlangsung pula proses kependidikan. Anak berperan sebagai peserta didik, orangtua sebagai pendidik. Hubungan interaksi anak dan orang tua inilah proses kependidikan Islam yang berlangsung. Perlakuan orang tua terhadap anak-anaknya ikut mempengaruhi pembentukan kepribadian maupun kecerdasan anak.

b. Taman Pendidikan Al-Qur'an (TPQ)

TPQ adalah lembaga pendidikan di luar sekolah yang berfungsi sebagai pengajaran dasar-dasar pelaksanaan ibadah dalam agama Islam, oleh sebab itu bersifat alamiah.

c. Majlis taklim.

Majlis taklim adalah salah satu sarana pendidikan dalam Islam. Majlis taklim lebih kita kenal dengan istilah pengajian-pengajian atau sering pula berbentuk halaqah. Umumnya berisi ceramah atau khutbah-khutbah keagamaan Islam. Tetapi dalam perkembangannya, majlis taklim sering juga digunakan sebagai wahana diskusi ilmiah, sosiologis, politik, hukum dan seterusnya. Ini sangat terlihat pada masjid-masjid dilingkungan perguruan tinggi.

Dengan corak dan isi pendidikan dan pengajaran sebagaimana tersebut di atas, dapatlah diharapkan bahwa keberadaan lembaga/institusi pendidikan itu terhimpun suatu seni, ilmu dan agama, yang merupakan tiga komponen pendidikan yang harus terkumpul dalam diri seseorang, baik secara pribadi maupun sebagai kelompok masyarakat.

C. KESIMPULAN

Dalam Islam, istilah humas belum ada pengertian secara spesifik. Hubungan masyarakat masih merupakan bangunan yang belum mendapat proporsi kajian yang menggembirakan, sehingga definisi humas dalam Islam secara spesifik belum ditemukan. Namun demikian bukan berarti Islam tidak menyadari pentingnya humas, Islam menyadari bahwa usaha untuk mencapai kebahagiaan (*al sa'adah*) tidak dapat dilakukan sendiri, tetapi harus bersama dengan yang lain atas dasar saling menolong (*al ta'awun*) dan saling melengkapi. Kondisi demikian menurut Masykawih akan tercipta apabila sesama manusia saling mencintai. Setiap pribadi merasa bahwa kesempurnaan dirinya akan terwujud karena kesempurnaan yang lain. Agama Islam mengatur bukan saja amalan-amalan peribadatan apalagi sekedar orang dengan Tuhan-nya, melainkan juga perilaku orang dalam berhubungan dengan sesama dan dunianya (Nasir, 2005 : 82). Dalam al-Qur'an al-Karim, istilah tersebut ditegaskan dengan *hablun min Allah dan hablun min alnas*, yang tercantum pada surat Ali Imron ayat 112, yang Artinya: "Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang kepada tali (agama) Allah dan tali (perjanjian) dengan sesama manusia".(Qs. Ali Imron ayat 112)

Sedangkan dalam sebuah Hadits Rosulullah saw. Menggambarkan bahwa hubungan antar sesama muslim adalah bagaikan suatu bangunan yang satu komponen dengan yang lainnya saling memperkuat, Sabda Nabi, dari Abu Musa, Rasulullah SAW bersabda yang artinya: " Hubungan orang mu'min dengan mu'min yang lain bagaikan bangunan yang saling memperkuat/menguatkan satu sama lain."(Muttafaq 'alaih)

Orang Islam adalah seperti sebuah bangunan yang saling melengkapi/menguatkan. Atas dasar itu maka setiap individu menjadi salah satu bagian dari yang lainnya. Manusia menjadi kuat karena kesempurnaan anggota - anggota badanya. Sebagai makhluk sosial, manusia memerlukan kondisi yang baik dari luar dirinya. Sebaik - baiknya manusia adalah orang yang berbuat baik kepada keluarga dan orang-orang yang masih ada kaitan dengannya, mulai dari saudara, anak yatim atau orang lain yang ada hubungannya.

Jadi, manajemen humas pada lembaga pendidikan Islam adalah suatu proses pengelolaan tentang komunikasi antara sekolah dengan masyarakat dengan tujuan menambah pengertian kepada masyarakat tentang proses, kebutuhan pendidikan, mendorong minat warga dan kerjasama untuk meningkatkan mutu sekolah dengan berlandaskan nilai-nilai Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi Dan Lia Yuliana. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta : Aditya Media. 2012
- Cahayani Ani. *Dasar-Dasar Organisasi Dan Manajemen*. Jakarta: Pt Grasindo. 2003.
- E.Mulyasa. *Manajemen Berbasis Sekolah*. Bandung: Pt Remaja Rosdakarya. 2005.
- Muhaimin. *Manajemen Pendidikan*. Jakarta: Kencana. 2010.
- Nasution, Zulkarnain. *Manajemen Humas Di Lembaga Pendidikan*. Malang: Umm Perss, 2006.
- Wibowo, Agus. *Manajemen Pendidikan Karakter Di Sekolah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2013.
- Tim Dosen Administrasi Pendidikan Universitas Pendidikan Indonesia. *Manajemen Pendidikan*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Rosyada, Dede. *Paradigma Pendidikan Demokratis*. Jakarta: Kencana. 2004.
- Syaiful. *Manajemen Strategi Dalam Peningkatan Mutu Pendidikan*. Bandung: Alfabeta. 2003.
- Luftiaafiyah. Nextwapblog.Com/Fungsi-Dan-Peran-Humas-Dilembaga Pendidikan.Htm.
- [Http://Huurinien.Blogspot.Co.Id/2015/09/Stakeholder-Dalam-Pendidikan.Html](http://Huurinien.Blogspot.Co.Id/2015/09/Stakeholder-Dalam-Pendidikan.Html)
- [Https://Rofiana.Wordpress.Com/11/06/09/Makalah-Peran-Humas-Dalam-Lembaga-Pendidikan](https://Rofiana.Wordpress.Com/11/06/09/Makalah-Peran-Humas-Dalam-Lembaga-Pendidikan)